



***RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH***



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN 2025**





# **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : [satpol.pp@luwutimurkab.go.id](mailto:satpol.pp@luwutimurkab.go.id)

---

### **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 14.1 TAHUN 2024**

#### **TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;



31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
34. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- KESATU : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 27 Mei 2024

KEPALA SATUAN,

**INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19701103 199003 1 002



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga penyusunannya telah berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJP, RPMJD, Renstra PD dan RKPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen Renja ini agar dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan sumbangsihnya sehingga Renja ini dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, 27 Mei 2024  
Kepala Satpol PP



**INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19701103 199003 1 002



## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                                        | i         |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                           | ii        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                             | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                                                  | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                                                                                  | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                                                               | 5         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                           | 5         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH<br/>TAHUN LALU .....</b>                                                                                       | <b>7</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten<br>Luwu Timur Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Luwu Timur ..... | 7         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Luwu Timur .....                                                                                   | 26        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi<br>Pamong Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.....                                                       | 30        |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                                                                                             | 31        |
| 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                                                                                                | 53        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                                                                                                   | <b>54</b> |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                                                                             | 54        |
| 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten<br>Luwu Timur .....                                                                                     | 54        |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                                                                                                            | 54        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....</b>                                                                                                            | <b>58</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                 | <b>92</b> |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut Satpol PP, sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Renja Satpol PP Tahun 2025.

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satpol PP ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.



21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor      Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Satpol PP Kab Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun;
3. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun;
4. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB. III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB. V PENUTUP**

- 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Luwu Timur Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan serta sejauhmana realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Dalam rangka pencapaian sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 telah melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           |
| 2.0 | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah         |
| 1   |                                                                        |
| 01  | Penyusunan Dokumen perencanaan pearangkat daerah                       |
| 02  | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA_SKPD                             |
| 04  | Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD                             |
| 07  | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                                      |
| 2.0 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah                                 |
| 2   |                                                                        |
| 01  | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                                      |
| 02  | Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN                          |
| 05  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun                 |
| 07  | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran |
| 2.0 | Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah                 |
| 3   |                                                                        |
| 08  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            |



|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |
| 5   |                                                                       |
| 03  | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                     |
| 05  | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai                    |
| 1   | Sosialisasi peraturan perundang-undangan                              |
| 0   |                                                                       |
| 11  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan            |
| 2.0 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |
| 6   |                                                                       |
| 01  | Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor     |
| 03  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |
| 04  | <b>Penyediaan bahan logistic kantor</b>                               |
| 05  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             |
| 0   | <b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>       |
| 6   |                                                                       |
| 08  | Fasilitasi kunjungan tamu                                             |
| 09  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                  |
| 2.0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah      |
| 7   |                                                                       |
| 06  | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                 |
|     |                                                                       |
| 2.0 | Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah                  |
| 8   |                                                                       |
| 0   | Penyediaan Jasa Surat menyurat                                        |
| 1   |                                                                       |
| 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik               |
| 04  | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor                                 |
| 2.0 | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah |
| 9   |                                                                       |





| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                     |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                | 3                                                                                   | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      | Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai                | 5                                                                    | 4                                                                           | 4                                                            |                                      |                       | 4 Dokumen                                                |                                                                                |                                              |
|      | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi    | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi                | 18                                                                   | 3                                                                           |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah                  | Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                | 47                                                                   | 39                                                                          | 39                                                           |                                      |                       | 40 Orang                                                 |                                                                                |                                              |
|      | Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan       | Jumlah orang yang mengikuti Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 8                                                                    | 7                                                                           | 12                                                           |                                      |                       | 12 Orang                                                 |                                                                                |                                              |
|      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum                              | 100%                                                                 | 100%                                                                        | 100%                                                         |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan  | 177                                                                  | 165                                                                         | 166                                                          |                                      |                       | 166 Paket                                                |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan peralatan rumah tangga                                | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                 | 210                                                                  | 191                                                                         | 191                                                          |                                      |                       | 191 Paket                                                |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan bahan logistic kantor                                 | Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan                                        | 11                                                                   | 4                                                                           | 10                                                           |                                      |                       | 10 Paket                                                 |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                               | 10                                                                   | 3                                                                           | 10                                                           |                                      |                       | 10 Paket                                                 |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                | 72                                                                   | 72                                                                          | 72                                                           |                                      |                       | 72 Dokumen                                               |                                                                                |                                              |



| Kode | Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                               | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                    |                                                                                      |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                  | 3                                                                                    | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah tamu yang difasilitasi                                                        | 120                                                                  | 12                                                                          | 12                                                           |                                      |                       | 4 Laporan                                                |                                                                                |                                              |
|      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti                                  | 275                                                                  | 12                                                                          | 422                                                          |                                      |                       | 12 Laporan                                               |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang terpenuhi                             | 77.5                                                                 | 100%                                                                        | 100%                                                         |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                | Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan                                                 | -                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       | 1 Unit                                                   |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan Peralatan dan Mesin                                      | Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan                                             | 40                                                                   | 14                                                                          | 16                                                           |                                      |                       | 23 Unit                                                  |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan Aset Tak berwujud                                        | Jumlah unit aset tak berwujud yang diadakan                                          | -                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan gedung Kantor dan bangunan lainnya                       | Jumlah Unit gedung/kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                      | -                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | -                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung                           | Jumlah kantor/bangunan lainnya yang disediakan                                       | 1                                                                    | 1                                                                           | 1                                                            |                                      |                       | 1 Unit                                                   |                                                                                |                                              |





| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      | Penyediaan Jasa Penujang Usuran Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah                        | 100%                                                                 | 100%                                                                        | 100%                                                         |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                             | 2500                                                                 | 12                                                                          | 12                                                           |                                      |                       | 12 Laporan                                               |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                                             | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                        | 36                                                                   | 60                                                                          | 60                                                           |                                      |                       | 60 Laporan                                               |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                                | 1                                                                    | 4                                                                           | 2                                                            |                                      |                       | 1 Laporan                                                |                                                                                |                                              |
|      | Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik | 100%                                                                 | 100%                                                                        | 100%                                                         |                                      |                       | 100%                                                     |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya           | 1                                                                    | 1                                                                           | 1                                                            |                                      |                       | 1 Unit                                                   |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                       | 30                                                                   | 37                                                                          | 36                                                           |                                      |                       | 36 Unit                                                  |                                                                                |                                              |
|      | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                           | Jumlah pralatan dan mesin yang dipelihara                                                        | 100                                                                  | 31                                                                          | 93                                                           |                                      |                       | 93 Unit                                                  |                                                                                |                                              |
|      | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara                                        | 2                                                                    | 2                                                                           | 2                                                            |                                      |                       | 2 Unit                                                   |                                                                                |                                              |



| Kode | Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                             |                                                                                               |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                                           | 3                                                                                             | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara      | 7                                                                    | 7                                                                           | 7                                                            |                                      |                       | 7 Unit                                                   |                                                                                |                                              |
|      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                        | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara | 100%                                                                 | 100%                                                                        |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                             | Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan                                               | 100%                                                                 | 100%                                                                        |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                             | Persentase penegakan perda                                                                    | 100%                                                                 | 100%                                                                        |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (daerah kabupaten/kota                          | Persentase penyelenggaraan yang ditangani tertib trantibum                                    | 100%                                                                 | 100%                                                                        |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                             | Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan Yang aktif                                                | 4,72                                                                 |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                             | Persentase SDM Aparatur terlatih                                                              | 33,70                                                                |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                             | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum Minimal                                   | 23,99                                                                |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |





| Kode | Usan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                       | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>2021) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Satpol PP<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target Renstra<br>Perangkat Daerah s/d<br>Tahun Berjalan |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                               | Target Renja<br>Satpol PP<br>Tahun 2024                         | Realisasi<br>Renja Satpol<br>PP Tahun<br>2024 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                         | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2025                       | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                             | 6                                                               | 7                                             | 8=(7/6)                     | 9                                                                       | 10=(5+7+9)                                                                              | 11=(10/4)                                                   |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah Tenaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat yang upahnya dibayarkan                                                                              | 216                                                                                    |                                                                                               |                                                                 |                                               |                             |                                                                         |                                                                                         |                                                             |
|      | Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | Jumlah Kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |                                                                                        | 225                                                                                           | 458                                                             |                                               |                             | 173 Laporan                                                             |                                                                                         |                                                             |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah operasi Penerbitan pelanggaran/gangguan K3 yang dilaksanakan                                                                                                             | 450                                                                                    |                                                                                               |                                                                 |                                               |                             |                                                                         |                                                                                         |                                                             |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan                                                                                                              | 8                                                                                      |                                                                                               |                                                                 |                                               |                             |                                                                         |                                                                                         |                                                             |
|      | Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan tingkat masyarakat Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                    |                                                                                        | 15                                                                                            | 15                                                              |                                               |                             | 15 Dokumen                                                              |                                                                                         |                                                             |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan                                              | 48                                                                                     |                                                                                               |                                                                 |                                               |                             |                                                                         |                                                                                         |                                                             |



| Kode | Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) |  | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                   | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        |  | 10=(5+7 +9)                                                                    | 11=(10/4)                                    |
|      | Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan keretiban umum                                                                                     | Jumlah dokumen yang memuat hasil pemerebdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan keretiban umum |                                                                      | 26                                                                          | 26                                                           |                                      |                       | 26 Dokumen                                               |  |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah Pelibatan (mobilisasi)Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana                                        | 12                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |  |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah anggota satlinmas yang mengikuti pelatihan                                                                   | 60                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |  |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan                                                            | 2                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |  |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah anggota Satlinmas yang dikukuhkan                                                                            | 128                                                                  |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |  |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                                                                          | Jumlah monitoring dan evaluasi Satlinmas yang dilaksanakan                                                          | 4                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |  |                                                                                |                                              |
|      | Peningkatan Kapsitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa hak asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya             |                                                                      | 200                                                                         | 230                                                          |                                      |                       | 155 Orang                                                |  |                                                                                |                                              |





| Kode | Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                                                     | 3                                                                                                         | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      |                                                                                                       | Jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas SDM                              | 216                                                                  |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                       | Jumlah Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan                           | 6                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                       | Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan yang mengikuti pelatihan                                     | 50                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                       | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan yang dilaksanakan         | 1                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                       | Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat Kompetensi                                               | 18                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan gangguan ketenteraman dan ketriban umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan |                                                                      | 1                                                                           | 2                                                            |                                      |                       | 1 Dokumen                                                |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                                       | Jumlah kerjasama penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda yang dilaksanakan                          | 1                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Ketertiban Masyarakat                        | Jumlah perlengkapan operasional yang diadakan                                                             | 50                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       | 58 Unit                                                  |                                                                                |                                              |



| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                               |                                                                                                    |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                             | 3                                                                                                  | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7 +9)                                                                    | 11=(10/4)                                    |
|      |                                                                               | Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia                         | -                                                                    | 306                                                                         | 58                                                           |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                               | Jumlah gedung posko trantibum yang di adakan                                                       | 1                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                               | Jumlah kendaraan operasional yang diadakan                                                         | -                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Penyusunan SOP ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                    | Jumlah dokumen SOP penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang disusun/didimutakhirkan   | 10                                                                   | 20                                                                          | 20                                                           |                                      |                       | 20 Dokumen                                               |                                                                                |                                              |
|      | Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan Daerah dan perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                |                                                                      | 4                                                                           | 4                                                            |                                      |                       | 4 Laporan                                                |                                                                                |                                              |
|      |                                                                               | Jumlah layanan ganti rugi kerusakan barang asset akibat terkena dampak penegakan perda dan perkada | 1                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                               | Jumlah layanan pengobatan cidera akibat terkena dampak penegakan perda dan perkada                 | 1                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Perauran Bupati/Walikota        | Persentase perda dan perkada yang ditegakkan                                                       | 100%                                                                 | 100%                                                                        | 100%                                                         |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |





| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                            | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha                                       | Hasil Sosialisasi Perda/Perkada                                      | 26                                                                          | 26                                                           |                                      |                       | 26 Laporan                                               |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan Bupati yang dilaksanakan                                               | 46                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                               | Jumlah Warga Negara yang memperoleh sosialisasi perda/perkada                                                                                | -                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                               | Jumlah sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan                                                                     | 23                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota | Hasil Pengawasan                                                     | 56                                                                          | 56                                                           |                                      |                       | 56 Laporan                                               |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                               | Jumlah Laporan pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang dilaksanakan                                                | 60                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                                               | Jumlah Pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan                                                                                   | 22                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |



| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                          | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                      |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                             | Target Renja Satpol PP Tahun 2024                            | Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                          | 3                                                                                                                                               | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                    | 8=(7/6)               | 9                                                        | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      |                                                                            | Jumlah pengawasan kawasan tanpa rokok (KTR) yang dilaksanakan                                                                                   | 44                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP                  |                                                                      | 7                                                                           | 5                                                            |                                      |                       | 5 Laporan                                                |                                                                                |                                              |
|      |                                                                            | Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran perda dan perkara yang tertangani                                                  | 55                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      |                                                                            | Jumlah Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Yang tertangani                                                                                          | 15                                                                   |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pembinaan Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                      | Persentase PPNS yang berkompeten                                                                                                                | 57,14%                                                               | 100%                                                                        | 100%                                                         |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |
|      | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                     | Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan trantibum serta penegakan perda dan perkara |                                                                      | 2                                                                           | 2                                                            |                                      |                       | 2 Laporan                                                |                                                                                |                                              |
|      |                                                                            | Jumlah PPNS yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas                                                                                        | -                                                                    |                                                                             |                                                              |                                      |                       |                                                          |                                                                                |                                              |





| Kode | Ususan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>2021) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Satpol PP<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target Renstra<br>Perangkat Daerah s/d<br>Tahun Berjalan |                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                                     |                                                           |                                                                                        |                                                                                               | Target Renja<br>Satpol PP<br>Tahun 2024                         | Realisasi<br>Renja Satpol<br>PP Tahun<br>2024 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                         | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2025                       | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                   | 3                                                         | 4                                                                                      | 5                                                                                             | 6                                                               | 7                                             | 8=(7/6)                     | 9                                                                       | 10=(5+7 +9)                                                                             | 11=(10/4)                                                   |
|      |                                                                     | Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan                       | 2                                                                                      |                                                                                               |                                                                 |                                               |                             |                                                                         |                                                                                         |                                                             |
|      |                                                                     | Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat PPNS     | 1                                                                                      |                                                                                               |                                                                 |                                               |                             |                                                                         |                                                                                         |                                                             |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur**

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Luwu Timur. Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menerapkan standar dan tolok ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan beberapa peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Peraturan menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam pada Tabel T-C.30.





Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Luwu Timur

| No | Indikator                                                                           | SPM | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah<br>Tahun Ke- |      |       |       | Realisasi Capaian<br>Tahun Ke- |       | Proyeksi |       | Catatan<br>Analisis |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------------------|-------|----------|-------|---------------------|
|    |                                                                                     |     |     | 2020                                         | 2021 | 2022  | 2023  | 2022                           | 2023  | 2024     | 2025  |                     |
| 1  | 2                                                                                   | 3   | 4   | 5                                            | 6    | 7     | 8     | 9                              | 10    | 11       | 12    | 13                  |
| 1  | Persentase penegakan perda                                                          |     |     | 86%                                          | 86%  | 100%  | 100%  | 100%                           | 100%  | 100%     | 100%  |                     |
| 2  | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan                               |     |     | 71%                                          | 75%  | 100%  | 100%  | 100%                           | 100%  | 100%     | 100%  |                     |
| 3  | Persentase warga Negara yang menerima layanan akibat dampak penegakana perd/perkada |     |     |                                              | 100% | 100%  | 100%  | 100%                           | 100%  | 100%     | 100%  |                     |
| 4  | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)                                    |     |     | 15                                           | 15   | 11    | 12    | 7,34                           | 7,31  | 13       | 15    |                     |
| 5  | Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang aktif                                      |     |     |                                              |      | 8,59  | 25,78 | 8,59                           | 20,31 | 49,97    | 60,16 |                     |
| 6  | Persentase SDM aparaturne terlatih                                                  |     |     |                                              | 33,7 | 49,61 | 62,52 | 49,34                          | 52,22 | 78,82    | 86,34 |                     |
| 7  | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai standar                                 |     |     |                                              |      | 23,99 | 40,46 | 23,99                          | 37,58 | 55,20    | 73,70 |                     |
| 8  | Persentase Standar Operasional Prosedur Trantibum yang dipenuhi                     |     |     |                                              | 10   | 20    | 20    | 20                             | 20    | 20       | 20    |                     |
| 9  | Persentase perda dan perkada yang diletakkan                                        |     |     |                                              | 100% | 100%  | 100%  | 100%                           | 100%  | 100%     | 100%  |                     |

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri atas penanganan gangguan ketenteraman ketertiban dan keindahan, penyelesaian penegakan peraturan daerah, keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                             | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |       |       |       | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |                                         | 2022                        | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |                                          |
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                       | 4                           | 5    | 6     | 7     | 8     | 10                                       |
| 1. | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada                                                            | 7,69%                                   | 9,10                        | 10   | 11,11 | 12    | 14,28 | 14,28                                    |
| 2. | Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan TRantibum                                                       | 7,69%                                   | 9,10                        | 10   | 11,11 | 12    | 14,28 | 14,28                                    |
| 3. | Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasara SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 65%                                     | 66,99                       | 68   | 70    | 71,75 | 73,75 | 73,75                                    |
| 4. | Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah                                                       |                                         | 100                         | 100  | 100   | 100   | 100   | 100                                      |



Sedangkan untuk Indikator Kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

| No | Indikator Kinerja Kunci (IKK)                                             | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                         | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                                          |
| 1  | 2                                                                         | 3                                       | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 10                                       |
| 1. | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                          | 8,37                                    | 11,00                       | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00                                    |
| 2. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | 1005                                    | 100%                        | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 3. | Persentase Penegakan PERDA                                                | 86%                                     | 100%                        | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 94,00%                                   |

Untuk target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Standar Pelayanan Minimal  
Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

| No | BIDANG                                                                  | JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN     | INDIKATOR                                                                                 | TARGET CAPAIAN SPM |      |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                         |                                            |                                                                                           | 2021               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada | 100%               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur**

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP adalah

- 1) Keterbasan kompetensi pegawai yang ada (PNS dan Upah Jasa),
- 2) Terbatasnya sarana prasarana
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dan ketaatan terhadap peraturan daerah.
- 4) Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem koordinasi yang baik antar stakeholder penegakan peraturan daerah yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Luwu Timur yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non-yustisial dan pro-yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Berkaca pada permasalahan yang ada, direkomendasikan bahwa:

- 1) Guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, penyelenggaraan ketertiban, dan penegakan peraturan daerah maka akan diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menangani gangguan Ketertiban, ketenteraman dan keindahan, menyelesaikan pelanggaran perda/perkada
- 3) Dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak diantaranya Polri/TNI, OPD Pengampu



Peraturan Daerah, para aparat di tingkat kecamatan desa/kelurahan hingga RT dan Dusun.

- 4) Penambahan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja .

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD.

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Satpol PP . Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31



Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                             |                      |                                                                                                      |                   |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                          |                      |                                                                                                         |                   |                       | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                           | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                 | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       | Program/<br>Kegiatan                                                              | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif        |                 |
| (1) | Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota      | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Persentase<br>penunjang<br>urusan<br>perangkat<br>daerah berjalan<br>sesuai standar<br>(%)    | (5)<br>100%       | (6)<br>5.583.508.399 | (7)<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Persentase<br>penunjang<br>urusan<br>perangkat<br>daerah<br>berjalan sesuai<br>standar (%)       | (10)<br>100%      | (11)<br>7.603.724.292 | (12)            |
|     | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | LUWU<br>TIMUR        | Persentase<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran &<br>evaluasi tepat<br>waktu (%) | 100%              | 138.097.000          | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah   | LUWU<br>TIMUR        | Persentase<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran<br>& evaluasi<br>tepat waktu<br>(%) | 100%              | 149.523.378           |                 |
|     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                        | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(dokumen)                                       | 2<br>Dokumen      | 61.711.200           | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                          | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah<br>(dokumen)                                    | 2<br>Dokumen      | 37.000.000            |                 |





| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                  |               |                                                                                                                |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                             |               |                                                                                                                   |                   |                | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                           | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                                                 | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                              | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                                                  | (3)           | (4)                                                                                                            | (5)               | (6)            | (7)                                                                                                  | (8)           | (9)                                                                                                               | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                 | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>RKA- SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen)                                                       | 2<br>Dokumen      | 5.469.000      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                 | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen RKA-<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen)                                                       | 1<br>Dokumen      | 3.321.650      |                 |
|     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen)                                          | -                 | -              | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD<br>yang disusun<br>(Dokumen)                                           | 1<br>Dokumen      | 3.327.500      |                 |
|     | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                            | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>DPA- SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen)                                                       | 2<br>Dokumen      | 7.591.000      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                             | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen DPA-<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen)                                                       | 1<br>Dokumen      | 3.327.500      |                 |
|     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen)                                          | -                 | -              | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD<br>yang disusun<br>(Dokumen)                                           | 1<br>Dokumen      | 3.327.500      |                 |
|     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>laporan capaian<br>kinerja dan<br>ikhtisar realisasi<br>kinerja yang<br>disusun<br>(Dokumen) | -                 | -              | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen<br>laporan capaian<br>kinerja dan<br>ikhtisar realisasi<br>kinerja yang<br>disusun<br>(Dokumen) | 3<br>Dokumen      | 49.528.120     |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                           |               |                                                                                   |                    |                | Hasil Analisis Kebutuhan                      |               |                                                                                   |                    |                | Catatan Penting |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                              | Target<br>Capaian  | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                          | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                              | Target<br>Capaian  | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                           | (3)           | (4)                                                                               | (5)                | (6)            | (7)                                           | (8)           | (9)                                                                               | (10)               | (11)           | (12)            |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | 11<br>Laporan      | 63.325.800     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | 8 Laporan          | 49.691.108     |                 |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        | LUWU<br>TIMUR | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)               | 100%               | 4.467.920.649  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        | LUWU<br>TIMUR | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)               | 100%               | 5.863.492.110  |                 |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | LUWU<br>TIMUR | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)                            | 40 Orang/<br>bulan | 4.365.002.049  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | LUWU<br>TIMUR | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)                            | 55 Orang/<br>bulan | 5.765.912.412  |                 |
|     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | LUWU<br>TIMUR |                                                                                   | 4<br>Dokumen       | 36.960.000     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | LUWU<br>TIMUR |                                                                                   | 100%               | 49.193.760     |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                           |                      |                                                                                                                 |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                         |                      |                                                                                                                    |                   |                   | Catatan Penting |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                         | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                                             | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                               | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif    |                 |
| (1) | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                     | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)                                                                                                             | (5)               | (6)            | (7)<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD           | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>jumlah laporan<br>monitoring dan<br>evaluasi yang<br>disusun                                                | (10)<br>100%      | (11)<br>3.327.500 | (12)            |
|     | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                               | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah dokumen<br>laporan hasil<br>koordinasi dan<br>pelaksanaan<br>akuntansi SKPD<br>yang disusun<br>(Dokumen) |                   |                | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                  | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>dokumen<br>laporan hasil<br>koordinasi dan<br>pelaksanaan<br>akuntansi SKPD<br>yang disusun<br>(Dokumen) | 4<br>Dokumen      | 19.743.870        |                 |
|     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah dokumen<br>laporan keuangan<br>bulanan/triwulanan/<br>semesteran<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen)    | 12<br>Laporan     | 36.365.400     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>dokumen<br>laporan<br>keuangan<br>bulanan/triwulanan/<br>semesteran<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen) | 12<br>Laporan     | 15.198.968        |                 |
|     | Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                                | LUWU<br>TIMUR        |                                                                                                                 |                   |                | Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                                   | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>kunjungan kerja<br>dalam daerah<br>yang<br>dilaksanakan                                                  | 100%              | 3.460.600         |                 |





| No  | Rancangan Awal RKPD                                                        |               |                                                                                                        |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                      |               |                                                                                                                 |                   |                | Catatan Penting |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                       | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                   | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                          | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                        | (3)           | (4)                                                                                                    | (5)               | (6)            | (7)                                                                           | (8)           | (9)                                                                                                             | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD    | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>laporan keuangan<br>akhir tahun SKPD<br>yang disusun<br>(Dokumen)                    | 1 Laporan         | 29.593.200     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD       | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen<br>laporan<br>keuangan akhir<br>tahun SKPD<br>yang disusun<br>(Dokumen)                       | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>laporan dan<br>analisis prognosis<br>realisasi anggaran<br>yang disusun<br>(Dokumen) |                   |                | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen<br>laporan dan<br>analisis<br>prognosis<br>realisasi<br>anggaran yang<br>disusun<br>(Dokumen) | 1<br>Dokumen      | 6.655.000      |                 |
|     | Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah         | LUWU<br>TIMUR | Persentase BMD<br>yang<br>Diadministrasi<br>sesuai standar<br>(%)                                      | 100%              | 30.706.200     | Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah            | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>BMD yang<br>Diadministrasi<br>sesuai standar<br>(%)                                               | 100%              | 25.954.500     |                 |
|     | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>SKPD      | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>kebutuhan barang<br>milik daerah<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen) |                   |                | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD         | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen<br>perencanaan<br>kebutuhan<br>barang milik<br>daerah SKPD<br>yang disusun<br>(Dokumen)       | 2<br>Dokumen      | 3.327.500      |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                           |                              |                                                                                                                |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                      |                              |                                                                                                                   |                   |                | Catatan Penting |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                         | Lokasi                       | Indikator<br>Kinerja                                                                                           | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                          | Lokasi                       | Indikator<br>Kinerja                                                                                              | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                     | (3)<br><b>LUWU<br/>TIMUR</b> | (4)<br>Persentase barang<br>milik daerah<br>SKPD yang<br>diamankan (%)                                         | (5)               | (6)            | (7)<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                              | (8)<br><b>LUWU<br/>TIMUR</b> | (9)<br>Persentase<br>barang milik<br>daerah SKPD<br>yang diamankan<br>(%)                                         | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD | <b>LUWU<br/>TIMUR</b>        | Jumlah dokumen<br>laporan hasil<br>rekonsiliasi<br>barang milik<br>daerah pada<br>SKPD (Dokumen)               |                   |                | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>pada SKPD | <b>LUWU<br/>TIMUR</b>        | Jumlah<br>dokumen<br>laporan hasil<br>rekonsiliasi<br>barang milik<br>daerah pada<br>SKPD<br>(Dokumen)            | 1 Laporan         | 6.655.000      |                 |
|     | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                          | <b>LUWU<br/>TIMUR</b>        | Jumlah dokumen<br>laporan<br>penatausahaan<br>barang milik<br>daerah pada<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen) | 12<br>Laporan     | 30.706.200     | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                          | <b>LUWU<br/>TIMUR</b>        | Jumlah<br>dokumen<br>laporan<br>penatausahaan<br>barang milik<br>daerah pada<br>SKPD yang<br>disusun<br>(Dokumen) | 12<br>Laporan     | 15.972.000     |                 |
|     | Pemanfaatan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                    | <b>LUWU<br/>TIMUR</b>        | Jumlah Barang<br>Milik Daerah<br>Perangkat Daerah<br>yang<br>dimanfaatkan                                      |                   |                | Pemanfaatan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                    | <b>LUWU<br/>TIMUR</b>        | Jumlah Barang<br>Milik Daerah<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>dimanfaatkan                                         |                   |                |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                             |               |                                                                                                                  |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                        |               |                                                                                                                     |                   |                | Catatan Penting |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                            | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                             | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                            | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                                | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                             | (3)           | (4)                                                                                                              | (5)               | (6)            | (7)                                                             | (8)           | (9)                                                                                                                 | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah              | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>Pegawai PD yang<br>dilayani (%)                                                                    | 100%              | 179.834.400    | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah              | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>Pegawai PD<br>yang dilayani<br>(%)                                                                    | 100%              | 221.980.680    |                 |
|     | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya | LUWU<br>TIMUR | Jumlah pakaian<br>dinas beserta<br>atribut<br>kelengkapannya<br>yang diadakan<br>(Paket)                         |                   |                | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya | LUWU<br>TIMUR | Jumlah pakaian<br>dinas beserta<br>atribut<br>kelengkapannya<br>yang diadakan<br>(Paket)                            | -                 | -              |                 |
|     | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian      | LUWU<br>TIMUR | Jumlah laporan<br>data administrasi<br>kepegawaian yang<br>dimutakhirkan<br>(Laporan)                            | 4<br>Dokumen      | 7.506.650      | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian      | LUWU<br>TIMUR | Jumlah laporan<br>data administrasi<br>kepegawaian<br>yang<br>dimutakhirkan<br>(Laporan)                            | 4<br>Dokumen      | 1.065.000      |                 |
|     | Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai    | LUWU<br>TIMUR | Jumlah dokumen<br>laporan hasil<br>monitoring, dan<br>evaluasi, dan<br>penilaian kinerja<br>pegawai<br>(Dokumen) | 4<br>Dokumen      | 20.640.000     | Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai    | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>dokumen<br>laporan hasil<br>monitoring, dan<br>evaluasi, dan<br>penilaian<br>kinerja pegawai<br>(Dokumen) | 5<br>Dokumen      | 21.296.000     |                 |





| Rancangan Awal RKPD |                                                               |                      |                                                                                                    |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                             |                      |                                                                                                    |                   | Catatan Penting     |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|
| No                  | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                          | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                               | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                 | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                               | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif      |      |
| (1)                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)                                       | (5)               | (6)            | (7)<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)                                       | (10)<br>40 orang  | (11)<br>150.000.000 | (12) |
|                     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasi kepada ASN                                 | 40 Orang          | 3.927.750      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasi kepada ASN                                 | 47 Orang          | 7.986.000           |      |
|                     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | 12 Orang          | 147.760.000    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | 10 Orang          | 41.633.680          |      |
|                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | LUWU<br>TIMUR        | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)                                        | 100%              | 417.319.350    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | LUWU<br>TIMUR        | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)                                        | 100%              | 403.222.526         |      |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                          |               |                                                                                                      |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                        |               |                                                                                                         |                   |                | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                        | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                 | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                            | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                          | (3)           | (4)                                                                                                  | (5)               | (6)            | (7)                                                                             | (8)           | (9)                                                                                                     | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | LUWU<br>TIMUR | Jumlah komponen<br>instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor<br>yang di sediakan<br>(jenis) | 166 Paket         | 7.222.800      | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>komponen<br>instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan<br>kantor yang di<br>sediakan (jenis) | 190 Paket         | 9.982.500      |                 |
|     | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                      | LUWU<br>TIMUR | Jumlah peralatan<br>rumah tangga<br>yang diadakan<br>(Unit)                                          | 191 Paket         | 10.178.000     | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                         | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>peralatan rumah<br>tangga yang<br>diadakan (Unit)                                             | 255 Paket         | 16.105.000     |                 |
|     | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                          | LUWU<br>TIMUR | Jumlah bahan<br>logistik kantor<br>yang disediakan<br>(jenis)                                        | 10 Paket          | 6.012.500      | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                          | LUWU<br>TIMUR | Jumlah bahan<br>logistik kantor<br>yang disediakan<br>(jenis)                                           | 11 Paket          | 7.986.000      |                 |
|     | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                              | LUWU<br>TIMUR | Jumlah Barang<br>cetakan dan/atau<br>penggandaan<br>yang diadakan<br>(jenis)                         | 10 Paket          | 11.475.000     | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                 | LUWU<br>TIMUR | Jumlah Barang<br>cetakan<br>dan/atau<br>penggandaan<br>yang diadakan<br>(jenis)                         | 10 Paket          | 16.105.100     |                 |
|     | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan        | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Penyediaan bahan<br>bacaan dan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan<br>(eksamplar)       | 72<br>Dokumen     | 7.800.000      | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan           | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Penyediaan<br>bahan bacaan<br>dan peraturan<br>perundang-<br>undangan<br>(eksamplar)          | 72<br>Dokumen     | 10.648.000     |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                |               |                                                                                 |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                           |               |                                                                                 |                   |                | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                               | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                               | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                | (3)           | (4)                                                                             | (5)               | (6)            | (7)                                                                | (8)           | (9)                                                                             | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | LUWU<br>TIMUR | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)                                           | 4 Laporan         | 8.250.000      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | LUWU<br>TIMUR | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)                                           | 180 Laporan       | 12.000.000     |                 |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | LUWU<br>TIMUR | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)                 | 422 Laporan       | 366.381.050    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | LUWU<br>TIMUR | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)                 | 351 Laporan       | 330.395.926    |                 |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | LUWU<br>TIMUR | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)                                  | 100%              | 49.864.000     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | LUWU<br>TIMUR | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)                                  | 82,5%             | 515.683.500    |                 |
|     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | LUWU<br>TIMUR | Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit) |                   |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | LUWU<br>TIMUR | Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit) |                   |                |                 |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | LUWU<br>TIMUR | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit))                                    |                   |                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | LUWU<br>TIMUR | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)                                     | 2 Unit            | 80.000.000     |                 |





| No  | Rancangan Awal RKPD                                                          |                      |                                                                                                |                   |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                                     |                      |                                                                                                |                   |                     | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                         | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                           | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif    | Program/<br>Kegiatan                                                         | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                           | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif      |                 |
| (1) | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)                                 | (5)<br>23 Unit    | (6)<br>49.864.000 | (7)<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)                                 | (10)<br>40 Unit   | (11)<br>197.653.500 | (12)            |
|     | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)                                                      |                   |                   | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)                                                      | 1 Unit            | 15.000.000          |                 |
|     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)                                    |                   |                   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)                                    | 5 Unit            | 25.000.000          |                 |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)                         |                   |                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)                         | 1 Unit            | 25.000.000          |                 |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) |                   |                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | 1 Unit            | 173.030.000         |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                     |            |                                                                           |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                |            |                                                                           |                   |                | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Lokasi     | Indikator<br>Kinerja                                                      | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                    | Lokasi     | Indikator<br>Kinerja                                                      | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                     | (3)        | (4)                                                                       | (5)               | (6)            | (7)                                                     | (8)        | (9)                                                                       | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | LUWU TIMUR | Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah yang tersedia (%) | 100%              | 93.657.800     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | LUWU TIMUR | Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah yang tersedia (%) | 100%              | 123.094.873    |                 |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | LUWU TIMUR | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)              | 12 Laporan        | 6.174.800      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | LUWU TIMUR | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)              | 2.500             | 6.655.000      |                 |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | LUWU TIMUR | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)      | 60 Laporan        | 72.483.000     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | LUWU TIMUR | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)      | 36 Laporan        | 96.474.873     |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | LUWU TIMUR | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)          | 1 Laporan         | 15.000.000     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | LUWU TIMUR | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)          | 1 Laporan         | 19.965.000     |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                         |                   |                    | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                               |                   |                     | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                    | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif     | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                     | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                          | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif      |                 |
| (1) | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                  | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Persentase<br>Barang Milik<br>Daerah<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>yang terpelihara<br>dengan baik (%)               | (5)<br>100%       | (6)<br>206.109.000 | (7)<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                           | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Persentase<br>Barang Milik<br>Daerah<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>yang terpelihara<br>dengan baik<br>(%)                  | (10)<br>100%      | (11)<br>300.772.725 | (12)            |
|     | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan  | LUWU<br>TIMUR        | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | 1 Unit            | 15.100.000         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan  | LUWU<br>TIMUR        | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan | 1 Unit            | 20.098.100          |                 |
|     | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah kendaraan<br>dinas operasional<br>yang dipelihara<br>dan dibayarkan<br>pajaknya (Unit)                                           | 36 Unit           | 120.900.000        | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>kendaraan dinas<br>operasional<br>yang dipelihara<br>dan dibayarkan<br>pajaknya (Unit)                                              | 34 Unit           | 159.187.600         |                 |





| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                          |                      |                                                                                                |                   |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                     |                      |                                                                                                |                   |                    | Catatan Penting |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                        | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                           | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif    | Program/<br>Kegiatan                                                                         | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                           | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif     |                 |
| (1) | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)                               | (5)<br>93 Unit    | (6)<br>38.990.000 | (7)<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)                               | (10)<br>150 Unit  | (11)<br>79.860.000 | (12)            |
|     | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                               | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara                                                       |                   |                   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                               | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara                                                       |                   |                    |                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)           | 2 Unit            | 16.720.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)           | 2 Unit            | 22.460.625         |                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 7 Unit            | 14.399.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi |                   |                    |                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi   |                   |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi   | 7 Unit            | 19.166.400         |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                         |               |                                                                                                 |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                    |               |                                                                                                 |                   |                | Catatan Penting |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                       | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                                                        | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                                                         | (3)           | (4)                                                                                             | (5)               | (6)            | (7)                                                                                                         | (8)           | (9)                                                                                             | (10)              | (11)           | (12)            |
|     |                                                                                                             |               | tasi (Unit)                                                                                     |                   |                |                                                                                                             |               | ilitasi (Unit)                                                                                  |                   |                |                 |
|     | Program<br>Peningkatan<br>Ketenteraman<br>Dan Ketertiban<br>Umum                                            | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Pelanggaran<br>Perda/Perkada<br>tahun berjalan<br>(kasus)                             | 100%              | 7.980.711.501  | Program<br>Peningkatan<br>Ketenteraman<br>Dan Ketertiban<br>Umum                                            | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Pelanggaran<br>Perda/Perkada<br>tahun berjalan<br>(kasus)                             | 100%              | 10.091.362.980 |                 |
|     | Penanganan<br>Gangguan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>Gangguan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum yang<br>tertangani<br>(Persen) | 100%              | 7.530.124.550  | Penanganan<br>Gangguan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>Gangguan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum yang<br>tertangani<br>(Persen) |                   |                |                 |
|     |                                                                                                             |               | Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>dengan<br>Satlinmas Aktif<br>(Persen)                           |                   |                |                                                                                                             | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>dengan<br>Satlinmas<br>Aktif (Persen)                           | 77,44%            | 9.300.395.380  |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                 |               |                                                                                                 |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                            |               |                                                                                                 |                   |                | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                               | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                            | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                 | (3)           | (4)                                                                                             | (5)               | (6)            | (7)                                                                                                                                                                 | (8)           | (9)                                                                                             | (10)              | (11)           | (12)            |
|     |                                                                                                                                                                     |               | Persentase standar teknis dan mutu SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi (Persen) |                   |                |                                                                                                                                                                     | LUWU<br>TIMUR | Persentase standar teknis dan mutu SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi (Persen) | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | LUWU<br>TIMUR | Jumlah Patroli siaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum (kali)                                    | 158<br>Laporan    | 6.778.879.200  | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | LUWU<br>TIMUR | Jumlah Patroli siaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum (kali)                                    | 4.015<br>Laporan  | 6.625.300.000  |                 |
|     | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | LUWU<br>TIMUR | Jumlah gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (gangguan)                     | 173<br>Laporan    | 100.097.300    | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | LUWU<br>TIMUR | Jumlah gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (gangguan)                     | 350<br>Laporan    | 147.750.000    |                 |





| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                               |                      |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                  |                       |                     | Catatan Penting |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                     | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian    | Pagu Indikatif    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                      | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian     | Pagu Indikatif      |                 |
| (1) | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketertarikan dan<br>Ketertarikan Umum<br>serta Perlindungan<br>Masyarakat<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                   | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Jumlah rapat<br>Koordinasi<br>penyelenggaraan<br>Ketertarikan dan<br>Ketertarikan Umum<br>tingkat kabupaten<br>dan tingkat<br>kecamatan yang<br>dilaksanakan<br>(kali) | (5)<br>15<br>Dokumen | (6)<br>61.689.800 | (7)<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketertarikan dan<br>Ketertarikan Umum<br>serta<br>Perlindungan<br>Masyarakat<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                         | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Jumlah rapat<br>Koordinasi<br>penyelenggaraan<br>Ketertarikan<br>dan Ketertarikan<br>Umum tingkat<br>kabupaten dan<br>tingkat<br>kecamatan yang<br>dilaksanakan<br>(kali) | (10)<br>48<br>Dokumen | (11)<br>155.103.750 | (12)            |
|     | Pemberdayaan<br>Perlindungan<br>Masyarakat dalam<br>rangka<br>Ketertarikan dan<br>Ketertarikan Umum                                                                                       | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>Desa/Kelurahan<br>dengan Satlinmas<br>aktif<br>(desa/kelurahan)                                                                                                     | 26<br>Dokumen        | 83.381.750        | Pemberdayaan<br>Perlindungan<br>Masyarakat dalam<br>rangka<br>Ketertarikan dan<br>Ketertarikan Umum                                                                                       | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>Desa/Kelurahan<br>dengan<br>Satlinmas aktif<br>(desa/kelurahan)                                                                                                        | 12<br>Dokumen         | 227.241.630         |                 |
|     | Peningkatan<br>Kapasitas SDM<br>Satuan Polisi<br>Pamongpraja dan<br>Satuan<br>Perlindungan<br>Masyarakat<br>termasuk dalam<br>Pelaksanaan Tugas<br>yang Bermuansa<br>Hak Asasi<br>Manusia | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah Aparatur<br>Satpol PP dan<br>Satlinmas yang<br>ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(orang)                                                                                 | 155 Orang            | 335.054.500       | Peningkatan<br>Kapasitas SDM<br>Satuan Polisi<br>Pamongpraja dan<br>Satuan<br>Perlindungan<br>Masyarakat<br>termasuk dalam<br>Pelaksanaan<br>Tugas yang<br>Bermuansa Hak<br>Asasi Manusia | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah<br>Aparatur Satpol<br>PP dan<br>Satlinmas yang<br>ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(orang)                                                                                 | 216 Orang             | 550.000.000         |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                      |                      |                                                                                                     |                     |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                        |                      |                                                                                                     |                      |                    | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                    | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                | Target<br>Capaian   | Pagu Indikatif    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                            | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                                | Target<br>Capaian    | Pagu Indikatif     |                 |
| (1) | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Jumlah kerjasama (MoU) Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang dilaksanakan (dokumen)        | (5)<br>1<br>Dokumen | (6)<br>20.568.000 | (7)<br>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Jumlah kerjasama (MoU) Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang dilaksanakan (dokumen)        | (10)<br>2<br>Dokumen | (11)<br>32.500.000 | (12)            |
|     | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum                                       | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang sesuai standar mutu SPM (jenis) | 58 Unit             | 125.000.000       | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum                                              | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah sarana dan prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang sesuai standar mutu SPM (jenis) | 50 Unit              | 1.532.000.000      |                 |
|     | Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat                                                             | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah SOP penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang disusun/dimutakhirkan (dokumen)  | 20<br>Dokumen       | 10.294.000        | Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat                                                                    | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah SOP penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang disusun/dimutakhirkan (dokumen)  | 20<br>Dokumen        | 15.500.000         |                 |
|     | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah                                                  | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan                   | 4 Laporan           | 15.160.000        | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada                                                   | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda                       | 5 Laporan            | 15.000.000         |                 |



| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                              |               |                                                                                         |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                         |               |                                                                                         |                   |                | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                             | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan                                                                                             | Lokasi        | Indikator<br>Kinerja                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| (1) | (2)<br>dan Perkada                                                                                               | (3)           | (4)<br>Perkada (persen<br>(%))                                                          | (5)               | (6)            | (7)                                                                                                              | (8)           | (9)<br>dan Perkada<br>(persen (%))                                                      | (10)              | (11)           | (12)            |
|     | Pengakan<br>Peraturan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali Kota                           | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>Penegakan<br>PERDA<br>(Persen)                                            | 100%              | 378.548.401    | Pengakan<br>Peraturan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali<br>Kota                        | LUWU<br>TIMUR | Persentase<br>Penegakan<br>PERDA<br>(Persen)                                            | 100 %             | 590.967.600    |                 |
|     | Sosialisasi<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali Kota                                | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Perda/Perkada<br>memuat sanksi<br>yang<br>disosialisasikan<br>(perda/perkada) | 26<br>Laporan     | 135.590.640    | Sosialisasi<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali Kota                                | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Perda/Perkada<br>memuat sanksi<br>yang<br>disosialisasikan<br>(perda/perkada) | 46<br>Laporan     | 132.000.600    |                 |
|     | Pengawasan atas<br>Kepatuhan<br>terhadap<br>Pelaksanaan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali Kota | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Perda/Pekada<br>yang memuat<br>sanksi yang<br>diawasi<br>(perda/perkada)      | 56<br>Laporan     | 113.725.861    | Pengawasan atas<br>Kepatuhan<br>terhadap<br>Pelaksanaan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali Kota | LUWU<br>TIMUR | Jumlah<br>Perda/Pekada<br>yang memuat<br>sanksi yang<br>diawasi<br>(perda/perkada)      | 60<br>laporan     | 208.967.000    |                 |





| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                     |                      |                                                                                            |                   |                    | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                       |                      |                                                                                               |                       |                     | Catatan Penting |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                    | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                       | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif     | Program/<br>Kegiatan                                                                           | Lokasi               | Indikator<br>Kinerja                                                                          | Target<br>Capaian     | Pagu Indikatif      |                 |
| (1) | Penanganan atas<br>Pelanggaran<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali Kota | (3)<br>LUWU<br>TIMUR | (4)<br>Jumlah<br>pelanggaran<br>Peda/Perkada<br>yang tertangani<br>(kasus)                 | (5)<br>5 Laporan  | (6)<br>129.231.900 | (7)<br>Penanganan atas<br>Pelanggaran<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Bupati/Wali Kota | (8)<br>LUWU<br>TIMUR | (9)<br>Jumlah<br>pelanggaran<br>Peda/Perkada<br>yang tertangani<br>(kasus)                    | (10)<br>35<br>Laporan | (11)<br>250.000.000 | (12)            |
|     | Pembinaan<br>Penyidik Pegawai<br>Negeri Sipil<br>(PPNS)<br>Kabupaten/Kota               | LUWU<br>TIMUR        | Persentase<br>Pelanggaran<br>Perda yang<br>tertangani<br>dengan baik oleh<br>PPNS (Persen) | 100%              | 72.038.550         | Pembinaan<br>Penyidik<br>Pegawai Negeri<br>Sipil (PPNS)<br>Kabupaten/Kota                      | LUWU<br>TIMUR        | Persentase<br>Pelanggaran<br>Perda yang<br>tertangani<br>dengan baik<br>oleh PPNS<br>(Persen) | 100%                  | 200.000.000         |                 |
|     | Pengembangan<br>Kapasitas dan<br>Karier PPNS                                            | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah PPNS<br>yang<br>dikembangkan<br>kapasitas dan<br>kariernya (orang)                  | 2 Laporan         | 72.038.550         | Pengembangan<br>Kapasitas dan<br>Karier PPNS                                                   | LUWU<br>TIMUR        | Jumlah PPNS<br>yang<br>dikembangkan<br>kapasitas dan<br>kariernya<br>(orang)                  | 3 Laporan             | 200.000.000         |                 |
|     | TOTAL                                                                                   |                      |                                                                                            |                   | 13.564.219.900     | TOTAL                                                                                          |                      |                                                                                               |                       | 17.695.087.272      |                 |

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema “Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”.

Pada RKP 2024 memuat tujuh prioritas nasional yang salah satunya berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Prioritas ke tujuh “Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, Satpol PP menetapkan tujuan:

**“Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif”**

Adapun Sasaran Satpol PP Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal
- 2) Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.

Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun



2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Penyusunan Dokumen perencanaan
    - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
    - Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semester
  - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD
  - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
    - Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
    - sosialisasi peraturan perundang-undangan
    - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  - 1.5 Administrasi Umum perangkat Daerah
    - penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
    - penyediaan peralatan rumah tangga
    - Penyediaan bahan logistik kantor

- penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Fasilitasi kunjungan tamu
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatannya sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatannya sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatannya sebagai berikut :
- 2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.. Sub kegiatannya sebagai Berikut :
- Pencegahan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
  - Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

- Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia.
- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
- Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, Sub Kegiatannya sebagai berikut :

- Sosialisasi Penegakan daerah dan Peraturan Bupati/walikota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota

2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupten/Kota, Sub kegiatannya sebagai berikut ;

- Pengembangan kapasitas dan karier PPNS



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut ini:



Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kabupaten Luwu Timur

| No | Kode | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |        |             |           |        |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
|    |      |                                                                                           |                                             |                                  |                                        |                                               | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        | Target |                  | Pagu Indikatif (Rp)               |    |                                   |
|    |      |                                                                                           |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |        |             | Nasional  | Daerah |        |                  |                                   |    |                                   |
| 1  | 2    | 3                                                                                         | 4                                           | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                   | 10     | 11          | 12        | 13     | 14     | 15               | 16                                | 17 |                                   |
|    |      | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        | 14.845.356.900,00   |        |             |           |        |        |                  | 18.353.274.505,00                 |    |                                   |
| 1  |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        | 14.845.356.900,00   |        |             |           |        |        |                  | 18.353.274.505,00                 |    |                                   |
| 1  | 0    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        | 14.845.356.900,00   |        |             |           |        |        |                  | 18.353.274.505,00                 |    |                                   |
| 1  | 1    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        | -                   |        |             |           |        |        | -                | 8.261.911.525,00                  |    |                                   |
|    | 0    |                                                                                           |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |        |             |           |        |        |                  |                                   |    |                                   |
|    | 5    |                                                                                           |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |        |             |           |        |        |                  |                                   |    |                                   |
|    | 1    |                                                                                           |                                             |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |        |             |           |        |        |                  |                                   |    |                                   |

59 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



60 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

61 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

62 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



63 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

64 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

65 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



66 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

67 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

68 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



69 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

70 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

71 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



72 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

73 | SATVAN POLISI PAMONG PRAJA

74 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



# RENCANA KERJA TAHUN 2025



|   |   |   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2500 Laporan                                                                           |            | 12 Laporan | 6.174.800,00  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif | 2500 Laporan | 6.655.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|---|---|---|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |            |            |               |                                                  |                              |   |                                                                                                                                                              |              |               |                            |
|   | 5 | 1 | . | 0                                             |                                                                                        |            |            |               |                                                  |                              |   |                                                                                                                                                              |              |               |                            |
|   |   |   | 8 | 2                                             |                                                                                        |            |            |               |                                                  |                              |   |                                                                                                                                                              |              |               |                            |
|   |   |   |   |                                               |                                                                                        |            |            |               |                                                  |                              |   |                                                                                                                                                              |              |               |                            |
|   |   |   |   |                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 60 Laporan | 72.483.000,00 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif | 36 Laporan   | 96.474.873,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  |            |            |               |                                                  |                              |   |                                                                                                                                                              |              |               |                            |
|   | 5 | 1 | . | 0                                             |                                                                                        |            |            |               |                                                  |                              |   |                                                                                                                                                              |              |               |                            |
|   |   |   | 8 | 4                                             |                                                                                        |            |            |               |                                                  |                              |   |                                                                                                                                                              |              |               |                            |

76 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



|   |   |   |   |   |                                                                                                                                         |         |  |  |            |                |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |                                     |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|-------------------------------------|
|   |   |   |   |   | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya    | 1 Unit  |  |  | 1 Unit     | 15.100.000,00  | Kab. Luwu<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | PENDAP<br>ATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | - | 01.Peningkatan<br>Tata Kelola<br>penyelenggara<br>an<br>pemerintahan<br>yang akuntabel<br>dan inovatif<br>4) Penguatan<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>Inovatif | - | 1 Unit  | 20.098.100,00  | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         |         |  |  |            |                |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |                                     |
|   | 5 | 1 | . | 0 |                                                                                                                                         |         |  |  |            |                |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |                                     |
|   |   |   | 9 | 2 |                                                                                                                                         |         |  |  |            |                |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |                                     |
|   |   |   |   |   | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 36 Unit |  |  | 36<br>Unit | 120.900.000,00 | Kab. Luwu<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | PENDAP<br>ATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | - | 01.Peningkatan<br>Tata Kelola<br>penyelenggara<br>an<br>pemerintahan<br>yang akuntabel<br>dan inovatif<br>4) Penguatan<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>Inovatif | - | 36 Unit | 159.187.600,00 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                |         |  |  |            |                |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |                                     |
|   | 5 | 1 | . | 0 |                                                                                                                                         |         |  |  |            |                |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |                                     |
|   |   |   | 9 | 6 |                                                                                                                                         |         |  |  |            |                |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |                                     |



# RENCANA KERJA TAHUN 2025



|   |   |   |   | Jumlah<br>Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara | 150<br>Unit                                                                                 |        | 93<br>Unit | 38.990.000,00 | Kab. Luwu<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | PENDAP<br>ATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | - | 01.Peningkatan<br>Tata Kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>yang akuntabel<br>dan inovatif<br>4) Penguatan<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>Inovatif | - | 150 Unit | 79.860.000,00 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |
|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0                                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                |        |            |               |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                               |   |          |               |                                     |
|   | 5 | 1 | . | 0                                                              |                                                                                             |        |            |               |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                               |   |          |               |                                     |
|   |   |   | 9 | 9                                                              |                                                                                             |        |            |               |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                               |   |          |               |                                     |
|   |   |   |   |                                                                | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/D<br>irehabilitasi | 2 Unit | 2 Unit     | 16.720.000,00 | Kab. Luwu<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | PENDAP<br>ATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | - | 01.Peningkatan<br>Tata Kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>yang akuntabel<br>dan inovatif<br>4) Penguatan<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>Inovatif | - | 2 Unit   | 22.460.625,00 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0                                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          |        |            |               |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                               |   |          |               |                                     |
|   | 5 | 1 | . | 0                                                              |                                                                                             |        |            |               |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                               |   |          |               |                                     |
|   |   |   | 9 | 9                                                              |                                                                                             |        |            |               |                                                                 |                                           |   |                                                                                                                                                                                               |   |          |               |                                     |

79 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

[illegible]



81 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



|   |   |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 2 Dokumen                                                                                                                                                           |                                                                                                    | 1 Dokumen  | 20.568.000,00 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif | - | 20 Dokumen | 32.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0                                                                                                         | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          |                                                                                                    |            |               |                                                  |                               |   |                                                                                                                                                              |   |            |               |                            |
|   | 5 | 2 | 0 | 0                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |            |               |                                                  |                               |   |                                                                                                                                                              |   |            |               |                            |
|   |   |   |   | 1                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |            |               |                                                  |                               |   |                                                                                                                                                              |   |            |               |                            |
|   |   |   |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | 20 Dokumen | 10.294.000,00 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif | - | 20 Dokumen | 15.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0                                                                                                         | Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                                                    |            |               |                                                  |                               |   |                                                                                                                                                              |   |            |               |                            |
|   | 5 | 2 | 0 | 0                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |            |               |                                                  |                               |   |                                                                                                                                                              |   |            |               |                            |
|   |   |   |   | 1                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |            |               |                                                  |                               |   |                                                                                                                                                              |   |            |               |                            |

83 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



84 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

[illegible]

|  |   |   |   |   |                                                                          |                                                                                                     |            |            |                |                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |   |            |                |                            |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------|----------------------------|
|  | 1 | 0 | 0 | 2 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | -                                                                                                   | 100%       | -          | 421.998.490,00 | -                                                | -                                                                                                            | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif<br>4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif | - | 100%       | 590.967.600,00 |                            |
|  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0                                                                        | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                  |            |            |                |                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |   |            |                |                            |
|  |   | 5 | 2 | 0 | 0                                                                        |                                                                                                     |            |            |                |                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |   |            |                |                            |
|  |   |   |   | 0 | 1                                                                        |                                                                                                     |            |            |                |                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |   |            |                |                            |
|  |   |   |   | 2 | 0                                                                        |                                                                                                     |            |            |                |                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |   |            |                |                            |
|  |   |   |   |   |                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 46 Laporan | 26 Laporan | 183.260.640,00 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT), PENDAP ATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif<br>4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif | - | 46 Laporan | 132.000.600,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |



[illegible]

# RENCANA KERJA TAHUN 2025



| Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                 |            |            |                |                                                  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                              |   |            |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------|----------------------------|
| 1                                                                                           | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 66 Laporan | 56 Laporan | 113.896.000,00 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT), PENDAP ATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN | - | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif | - | 66 Laporan | 208.967.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1                                                                                           | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                                   | 100%       | -          | 32.708.550,00  |                                                  |                                                                                                                       | - | 01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang          | - | 100%       | 200.000.000,00 |                            |

89 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan sebagai implementasi dari Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2025 dilakukan dengan berupaya mewujudkan konsistensi antara dokumen renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satpol PP .

Renja Satpol PP merupakan dokumen operasional yang memuat sejumlah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 melalui koordinasi/asistensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. RKA yang telah disetujui oleh TAPD dan DPRD dalam pembahasan RAPBD akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP sebagai penjabaran dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Renja Satpol PP Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja Perangkat Daerah, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Bagi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, Dokumen Renja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun

kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satpol PP Tahun 2025, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program.

3. Pada Akhir Tahun anggaran 2025, Satpol PP wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

Akhir kata semoga Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, 27 Mei 2024

Kepala Satpol PP

**INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002